



KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL DAN KEAMANAN MARITIM NEGARA INDIA DAN DAMPAKNYA BAGI KEPENTINGAN NASIONAL -INDONESIA

Cokro Sudarmanto Hendra Atmaja, Muhammad Munir, Henny Batara Maya

The State Intelligence College, Sentul, 16810

Abstrak

Hubungan bilateral antara Indonesia dan India telah berkembang sejak peristiwa pada tahun 1947 di New Delhi, ketika kedua negara menjalin kerjasama untuk menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan ekonomi. Dalam perkembangan hubungan ini, perjanjian persahabatan pada tahun 1951 memperkuat komitmen keduanya untuk keluar dari masa penjajahan bangsa-bangsa Barat. Fondasi dasar kerjasama ini adalah persamaan nasib dalam masa penjajahan dan aspirasi untuk membangun tatanan dunia baru yang damai. Kerjasama bilateral semakin kuat dengan peran Indonesia dan India dalam memimpin Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Kemitraan strategis ditandatangani pada tahun 2005, yang meliputi bidang pertanian, perdagangan, teknologi, hukum, pendidikan, dan pertahanan, mempercepat perkembangan kerjasama bilateral. Kerjasama maritim antara Indonesia dan India menjadi fokus penting dalam hubungan ini, dengan penandatanganan perjanjian dan kesepakatan tahunan yang memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim. Data menunjukkan peningkatan kerjasama maritim antara 2001-2017, termasuk kerjasama dalam pertahanan, industri kelautan, dan patroli gabungan. Namun, dalam konteks persaingan antara India dan Tiongkok di Samudera Hindia, kebijakan maritim India dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan nasional Indonesia. Indonesia melakukan strategi hedging dengan menjalin kerjasama maritim yang intensif dengan kedua negara tersebut, tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat posisinya di wilayah Samudera Hindia. Pengamatan tentang dampak kebijakan maritim India terhadap kepentingan nasional Indonesia menyoroti pentingnya persepsi bersama tentang ancaman dan keamanan maritim. Dengan meningkatnya aktivitas pelayaran dan kriminalitas laut di wilayah Selat Malaka, kerjasama maritim menjadi semakin penting bagi kedua negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Kata Kunci: Keamanan Maritim India, Kebijakan Keamanan Nasional, Hubungan Bilateral.

PENDAHULUAN

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan India dimulai pada periode antara 23 Maret hingga 2 April 1947 di New Delhi. Pada waktu itu, keduanya berupaya untuk menciptakan perdamaian global dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada tahun 1951, mereka menandatangani perjanjian persahabatan, yang dipengaruhi oleh komitmen presiden India dan Indonesia saat itu, yakni Jawaharlal Nehru dan Soekarno, untuk mengakhiri penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat. Kesamaan pengalaman di bawah penjajahan menjadi dasar bagi keduanya untuk bekerjasama dalam mencapai perdamaian dan membangun tatanan dunia yang baru. Selain itu, hubungan bilateral semakin menguat ketika Indonesia dan India memimpin Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika.

Selain itu, pada tahun 2005, saat kunjungan Presiden RI ke India, Indonesia dan India juga menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis yang mencakup berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, teknologi, hukum, pendidikan, dan pertahanan. Setelah ditandatangani, perkembangan kerjasama bilateral antara keduanya berkembang pesat. Presiden India menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia bertujuan untuk memperdalam kemitraan strategis yang akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, termasuk kerjasama maritim antara India dan Indonesia.

Kerjasama dalam bidang maritim antara kedua negara dimulai

pada tahun 2005 melalui perjanjian pembentukan New Strategic Partnership dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang kelautan dan perikanan antara Indonesia dan India, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri India pada tahun 2005. Perjanjian ini kemudian diperpanjang pada tahun 2011, sementara Indonesia dan India sepakat untuk membangun visi misi strategis untuk 15 tahun ke depan, sesuai laporan Kementerian Luar Negeri India pada tahun 2011. Pada bulan April 2014, pemimpin angkatan laut dari kedua negara menghadiri dan berperan dalam seremonial pembukaan dan penutupan acara tersebut. Pada tahun 2015, kerjasama dalam patroli bersama (CORPAT) ditingkatkan dengan pengenalan CORPAT yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dalam bentuk Inaugural India-Indonesia Bilateral Maritime Exercise.

Pada tahun 2015, hubungan kerjasama maritim antara Indonesia dan India mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan ini tercermin dari peningkatan jumlah kerjasama yang terbentuk pada tahun tersebut. Pada tahun 2015, Indonesia dan India menjalankan enam jenis kerjasama maritim yang berbeda, termasuk latihan bersama multilateral di bidang maritim, latihan militer bersama antara kedua negara, patroli bersama, Kunjungan kapal India ke Indonesia, kunjungan kapal Indonesia ke India, dan penandatanganan perjanjian tentang pertahanan dan keamanan maritim merupakan contoh kerjasama yang terjadi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013

dan 2014, di mana hanya ada tiga kerjasama pada masing-masing tahun tersebut. Di samping peningkatan jumlah kerjasama maritim, terdapat juga perluasan dalam kerjasama patroli bersama, yang terlihat dalam Coordinated Patrol ke-26 pada tahun 2015. Tidak hanya melibatkan patroli aktif, tetapi juga latihan bersama dari angkatan militer kedua negara.

Berdasarkan informasi yang tersedia, kerjasama maritim antara Indonesia dan India selama periode 2001–2017 dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim terjadi sebanyak lima kali, termasuk perjanjian seperti Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan pada tahun 2001, Patroli Terkoordinasi pada tahun 2002, Pembentukan Kemitraan Strategis Baru pada tahun 2005 yang meliputi aspek-aspek tentang pertahanan dan keamanan maritim, kerjasama dalam sektor pertahanan dan industri pertahanan pada tahun 2015, serta kolaborasi dalam domain pertahanan dan keamanan maritim. Kedua, kolaborasi di sektor kelautan dan perikanan terjadi dua kali, yang melibatkan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kelautan dan Perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian India pada tahun 2005, dan juga kerjasama dalam Pengembangan Kelautan dan Perikanan antara Indonesia dan India pada tahun 2011. Ketiga, pertemuan Komisi Bersama yang memperbincangkan masalah kelautan diadakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2003, 2005, dan 2007. Keempat, kerjasama Patroli Terkoordinasi antara Indonesia dan India terjadi sebanyak 29 kali sepanjang periode 2001 hingga 2017. Kelima, kerjasama Angkatan Laut terjadi enam kali, ini mencakup keterlibatan India dalam latihan

gabungan Angkatan Laut "KOMODO" pada tahun 2014, kunjungan kapal perang India di Jakarta pada tahun 2015, kunjungan KRI Regel di Kochi pada tahun 2015, latihan gabungan Angkatan Laut yang dilaksanakan bersamaan dengan Patroli Terkoordinasi pada tahun 2015 dan 2016, serta kesepakatan kerjasama pelatihan kapal selam pada tahun 2017.

Dari analisis hubungan bilateral antara India dan Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki kebijakan keamanan nasional yang khususnya relevan dalam konteks keamanan maritim. Implementasi kebijakan-kebijakan ini memiliki potensi untuk memengaruhi atau berdampak pada kedua negara, baik India maupun Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan diperinci lebih lanjut mengenai kebijakan maritim India serta pengaruh atau dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi komparasi. Penelitian Komparasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih, serta mengungkapkan hubungan sebab-akibat di antara mereka. Selain itu, penelitian komparasi juga dilakukan untuk membandingkan variabel tertentu dari objek penelitian, baik antara subjek yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda, dengan tujuan menemukan hubungan sebab-akibat di antaranya.

Metode komparasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan data dan sampai pada kesimpulan yang baru. Istilah "komparasi" sendiri berasal dari bahasa Inggris "compare", yang berarti membandingkan untuk menemukan persamaan antara dua konsep atau lebih. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencapai kesimpulan dengan cara

membandingkan ide, pendapat, dan pemahaman, dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka.

Dengan menerapkan metode komparasi ini, peneliti bermaksud untuk mencapai kesimpulan dengan cara membandingkan ide, pendapat, dan pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keamanan Nasional dan Keamanan Maritim

Perspektif klasik mengenai keamanan sering dijelaskan dalam konteks militer, dengan fokus utama pada pertahanan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Saat Hans Kelsen memperkenalkan gagasan Keamanan Kolektif dalam hukum internasional pada tahun 1957, keamanan diinterpretasikan sebagai 'perlindungan individu dari penggunaan kekuatan oleh pihak lain'. Dengan demikian, keamanan nasional dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan terhadap wilayah dari ancaman dan serangan militer eksternal, yang dianggap sebagai landasan eksistensi negara yang berdaulat.

Keamanan maritim, sebagai aspek penting dari keamanan nasional, ditetapkan oleh penerapan kebijakan keamanan nasional dalam konteks kebijakan nasional. Ini melibatkan upaya dalam pertahanan dan perlindungan terhadap negara yang diatur oleh peran dan strategi Angkatan Laut. Konsep keamanan maritim juga mencakup kondisi di mana tidak ada ancaman atau gangguan di perairan, seperti konflik antarnegara, tindakan terorisme di laut, perdagangan manusia, serta narkotika secara ilegal, serta kegiatan perdagangan gelap. Definisi ini menekankan pentingnya menciptakan stabilitas untuk mencapai keamanan di laut.

Dengan mempertimbangkan ciri-ciri keamanan maritim tersebut, negara diharapkan dapat merumuskan

strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman keamanan di laut. Langkah ini memerlukan identifikasi terhadap kepentingan nasional yang perlu dilindungi dengan langkah-langkah dan strategi yang efektif. Untuk melakukannya, negara perlu memiliki persepsi bersama tentang apa yang dianggap sebagai ancaman, sebuah proses yang dikenal sebagai sekuritisasi.

Kebijakan Keamanan Maritim India

India, terletak di wilayah Asia Selatan, memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 7.000 kilometer, menyebar dari bagian anak benua India. Negara ini menempati peringkat kedua dalam hal populasi di dunia setelah Republik Rakyat Cina, dengan jumlah penduduknya mencapai 1,2 miliar orang. Jumlah populasi India terus meningkat sejak pertengahan tahun 1980-an. Secara geografis, India adalah negara terbesar ketujuh dengan luas wilayah sekitar 3.287.263 kilometer persegi. Peran India dalam sejarah sangat penting sebagai bagian dari rute perdagangan yang memiliki signifikansi besar. Negara ini berbagi perbatasan dengan Republik Rakyat Cina, Pakistan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Afganistan dan Bhutan. Maladewa, Sri Lanka, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang berdekatan. India berbatasan dengan Myanmar di sebelah timur, Pakistan dan Laut Arab di sebelah barat, Nepal, Rusia, dan China di sebelah utara, serta Samudra Hindia di sebelah selatan.

Persaingan antara Tiongkok dan India di Samudra Hindia berkaitan dengan kebijakan dan visi masing-masing negara terhadap wilayah tersebut. Bagi India, persaingan ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan status dan identitas nasional. India menganggap dirinya sebagai kekuatan utama di kawasan tersebut, meskipun Tiongkok tidak mengakui klaim tersebut. Persaingan

India-Tiongkok di Samudra Hindia, menurut David Brewster, merupakan kontes status dan legitimasi di kawasan tersebut. Namun, pandangan mengenai persaingan ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Terkadang, persaingan antara dua negara bisa memiliki kepentingan yang sama, tetapi sering kali juga berbeda, sehingga memerlukan penilaian dari sudut pandang yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa India dan Tiongkok bersaing dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas di wilayah Samudra Hindia. Tiongkok tengah mendorong inisiatif OBOR (One Belt One Road) dengan investasi sekitar 40 miliar Dolar Amerika. Selain itu, Tiongkok juga menjalin hubungan dengan beberapa negara di sekitar wilayah proyek OBOR seperti Myanmar, Bangladesh, dan Sri Lanka. Tiongkok juga memodernisasi Angkatan Lautnya di Samudra Hindia sejak tahun 2009. India merespons upaya Tiongkok dengan meningkatkan diplomasi, ekonomi, dan keamanan seluruh negara yang tergabung dalam IORA (Indian Ocean Rim Association).

IORA, sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Samudra Hindia, memegang peranan yang strategis dalam perekonomian global dan konektivitas perdagangan internasional dari Asia ke Eropa. Organisasi ini berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, keamanan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan. Prioritas kerja sama di dalam IORA meliputi upaya-upaya dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan di perairan, memfasilitasi perdagangan, mengelola sumber daya perikanan, mengurangi risiko bencana alam, kerja sama akademis, pertukaran budaya, dan pembangunan sektor pariwisata. India, melalui partisipasinya dalam IORA, juga berusaha untuk

memperkuat perannya di kawasan Samudra Hindia serta untuk mengantisipasi perkembangan Tiongkok.

Dampak Kebijakan Keamanan Maritim India Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia dan Upaya Indonesia Untuk Melindungi Kepentingan Nasional

Selat Malaka merupakan sebuah jalur pelayaran vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menghubungkan tiga negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu India, Indonesia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai jalur utama dalam transportasi maritim yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Indonesia-Eropa dan Australia, Selat Malaka memiliki peran strategis yang sangat vital. Jalur ini menjadi jalur laut Timur-Barat terpendek jika dibandingkan dengan titik-titik penghubung lainnya, seperti Selat Makasar dan Selat Lombok. Setiap tahunnya, nilai perdagangan yang dilakukan melalui Selat Malaka mencapai jutaan Euro. Untuk mendukung proses pengiriman dan penumpukan muatan, terdapat lima pelabuhan internasional yang berada di sekitar Selat Malaka, yaitu Pelabuhan Klang, Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Belawan (Medan) dan Pelabuhan Pulau Pinang.

Selat Malaka memegang peran strategis dalam jaringan transportasi laut global. Berada di posisi geografis yang sangat penting, Selat Malaka dilalui sekitar 200 kapal setiap hari, setara dengan sekitar 6000 kapal per bulan, dan 70.000 kapal per tahun. Sebagian besar kapal ini membawa kargo perdagangan dunia, termasuk sejumlah besar kapal tanker yang mengangkut minyak dan LNG. Volume pelayaran di Selat Malaka menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa jumlah pelayaran di Selat Malaka

meningkat dari tahun 2000 hingga 2015, meskipun ada fluktuasi tertentu dalam angka tersebut. Namun demikian, tingkat kejahatan di perairan, terutama di Selat Malaka, juga cukup tinggi. Selama periode 2013–2015, jumlah kejahatan di laut cenderung stabil, meskipun terdapat peningkatan dari tahun 2013 ke 2014 dan dari tahun 2014 ke 2015.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kebijakan maritim India terutama dalam kaitannya dengan Samudra Hindia, yang tentunya akan memengaruhi keamanan maritim Indonesia dan, pada gilirannya, kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, di tengah persaingan antara Tiongkok dan India, Indonesia terus menjalin kerjasama, khususnya di bidang maritim. Kerjasama ini mencerminkan strategi hedging yang dilakukan Indonesia terhadap persaingan antarnegara di Asia Tenggara. Melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan, Indonesia dan Tiongkok menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kerjasama maritim, yang meliputi berbagai bidang seperti infrastruktur, keamanan navigasi, penelitian maritim, dan pelestarian lingkungan laut.

SIMPULAN

Keamanan nasional mengacu pada perlindungan wilayah dari ancaman dan serangan militer eksternal, sementara keamanan maritim merupakan elemen krusial dari keamanan nasional yang implementasinya dipengaruhi oleh kebijakan keamanan nasional suatu negara. India, yang memiliki garis pantai sepanjang 7000 km², memiliki kebijakan keamanan maritim yang mencakup perjanjian kerjasama dengan negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Implementasi kebijakan maritim India, terutama dalam konteks persaingan antara Tiongkok dan India di Samudra Hindia, berpotensi mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Dalam

mengatasi hal ini, Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan India, terutama di bidang maritim.

Dengan pertambahan jumlah pelayaran dan tingginya tingkat kejahatan di laut, Indonesia merasa penting untuk memperkuat kerjasama maritim dengan India. Ini tercermin dalam peningkatan kerjasama pada tahun 2015, Indonesia dan India melaksanakan patroli gabungan reguler ke-26. Selain melibatkan kegiatan patroli bersama, patroli ini juga mencakup latihan bersama di wilayah Kepulauan Andaman dan Nikobar, serta patroli bersama di Laut Andaman, Selat Malaka dan Nikobar. Latihan Bersama yang dilakukan angkatan laut bilateral merupakan yang pertama kalinya bagi Indonesia dan India.

Tujuan dari latihan bersama antara India dan Indonesia adalah untuk memperkuat ikatan maritim antara kedua negara dan melakukan peningkatan terhadap kemampuan angkatan laut keduanya, khususnya saat menjaga keamanan jalur transportasi laut yang dimiliki oleh keduanya. Indonesia dan India sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan maritim demi kepentingan bersama dan global. Salah satu aspek kerjasama yang ditekankan adalah patroli bersama, yang telah dimulai oleh kedua negara dan menjadi pusat dari peningkatan kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Brewster, David. 2015. *China and India at Sea: A Contest of Status and Legitimacy in the Indian Ocean*. (Australia India Institute, 2015): 12.

Christian Bueger. 2015. "What is Maritime Security". *Journal Marine Policy*, Vol. 53 (159-164)

<https://indonesiabaik.id/infografis/io>. Diakses pada 08 Juni 2022.

[https://www.cfr.org/annual-report-](https://www.cfr.org/annual-report-2016)

[2016](https://www.cfr.org/annual-report-2016)

Iwa Husen, 2004. *Geografi untuk SLTP kelas III*, Bandung: Grafindo Media Pratama.

Junida, Ade Irma. 2015. *Indonesia - Tiongkok rintis kerja sama maritim*. <http://www.antaraneews.com/berita/507288/indonesia--tiongkok-rintis-kerja-sama-maritim> . Diakses pada 08 Juni 2022

Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media (Cetakan Ke-VII penerjemah: Raisul Muttaqien).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *Menlu RI dan Tiongkok Sepakat Tingkatkan Hubungan Bilateral*. <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-dan-Tiongkok-Sepakat-Tingkatkan-Hubungan-Bilateral.aspx>. Diakses pada 08 Juni 2022

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *Presiden Jokowi Tekankan Kerja Sama Ekonomi dan Maritim dalam Kemitraan ASEAN-RRT*. [http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Tekankan Kerja-Sama-Ekonomi-dan-Maritim-dalam-Kemitraan-ASEAN-RRT.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Tekankan-Kerja-Sama-Ekonomi-dan-Maritim-dalam-Kemitraan-ASEAN-RRT.aspx). Diakses pada 08 Juni 2022

Laksamana Pertama (TNI) Edhi Nuswantoro (Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat). 2005. *"Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malaka"*.

Octavian, Amaruli dan Yulianto, Bayu. 2014. *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia

Tiezzi, Shannon. 2015. *Indonesia, China Seal 'Maritime Partnership'*. <http://thediplomat.com/2015/03/indonesia-china-seal-maritime-partnership/> Diakses pada 08 Juni 2022